

Efektivitas Pengawasan Pemerintah Desa terhadap Program Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa Bodag

The Effectiveness of Village Government Oversight on the Savings and Loan Program of Bodag Village-Owned Enterprise (BUMDes)

Achmad Irwan Guzali, Gading Gamaputra

Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

email: achmad.21012@mhs.unesa.ac.id

Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

email: gadinggamaputra@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji efektivitas pengawasan Pemerintah Desa terhadap pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dengan fokus pada program simpan pinjam BUMDes Artha Tirta Niaga di Desa Bodag, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana pengawasan pemerintah desa berjalan efektif dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn yang mencakup tiga indikator, yaitu kecukupan, responsivitas, dan ketepatan. Permasalahan penelitian dilatarbelakangi oleh terjadinya penyalahgunaan pengelolaan dana program simpan pinjam yang berujung pada pembekuan sementara program oleh pemerintah desa, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas fungsi pengawasan yang dijalankan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan pemerintah desa berada pada kategori cukup efektif. Pada indikator kecukupan, pengawasan telah melibatkan berbagai pihak, seperti perangkat desa, masyarakat, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, namun masih cenderung bersifat administratif dan belum menyentuh aspek substantif. Pada indikator responsivitas, pemerintah desa menunjukkan kemampuan merespons laporan masyarakat secara relatif cepat melalui pelaksanaan audit internal dan musyawarah desa, meskipun tindak lanjut pengawasan belum sepenuhnya optimal. Sementara itu, pada indikator ketepatan, kebijakan pembekuan program serta pembentukan kepengurusan baru dinilai tepat sebagai langkah perbaikan tata kelola BUMDes. Secara keseluruhan, pengawasan pemerintah desa terhadap program simpan pinjam BUMDes di Desa Bodag tergolong cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan kapasitas aparatur, penguatan partisipasi masyarakat, serta penerapan mekanisme audit yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengawasan, Pemerintah Desa, BUMDes, Simpan Pinjam, William N. Dunn.

Abstract

This study examines the effectiveness of village government supervision over the implementation of Village-Owned Enterprise (BUMDes) programs, focusing on the savings and loan program of BUMDes Artha Tirta Niaga in Bodag Village, Panggul Subdistrict, Trenggalek Regency. The objective of this research is to analyze the effectiveness of village government supervision using William N. Dunn's policy evaluation framework, which consists of three indicators: adequacy, responsiveness, and appropriateness. The research problem arises from the misuse of fund management within the savings and loan program, which led to the temporary suspension of the program by the village government and raised questions regarding the effectiveness of the supervisory function. This study employs a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The findings indicate that the effectiveness of village government supervision can be categorized as moderately effective. In terms of adequacy, supervision has involved various stakeholders, including village officials, the community, and the Village Community Empowerment Agency; however, it remains largely administrative rather than substantive. Regarding responsiveness, the village government has demonstrated a relatively prompt response to community reports through internal audits and village deliberation meetings, although follow-up actions have not been fully optimal. Meanwhile, in terms of appropriateness, the decision to suspend the program and establish a new management structure is considered appropriate as a corrective measure to improve BUMDes governance. Overall, the effectiveness of village government supervision over the BUMDes savings and loan program in Bodag Village is deemed fairly good, yet it requires enhanced supervisory capacity, stronger community participation, and the implementation of more systematic and sustainable audit mechanisms to achieve optimal outcomes.

Keywords: Effectiveness, Supervision, Village Government, BUMDes, Loan and Savings Program, William N. Dunn.

Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia menganut prinsip desentralisasi yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Otonomi desa dimaknai sebagai ruang kebijakan strategis untuk mendorong pembangunan berbasis kebutuhan dan potensi lokal. Kartikasari et al. menyatakan bahwa "otonomi daerah merupakan bentuk pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah agar mampu mengelola urusan pemerintahan secara efektif dan mandiri" (Kartikasari et al., 2023). Dalam konteks tersebut, desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek utama yang berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Penguatan peran desa semakin relevan seiring dengan meningkatnya tanggung jawab pemerintah desa dalam pengelolaan sumber daya dan keuangan desa. Handayani menegaskan bahwa "keuangan desa menjadi instrumen strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa secara berkelanjutan" (Handayani, 2021). Oleh karena itu, setiap kebijakan dan program desa menuntut tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes dirancang sebagai lembaga ekonomi desa yang berfungsi mengelola potensi lokal melalui unit-unit usaha yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat. Riyanti et al. menyebutkan bahwa “BUMDes merupakan wujud usaha kolektif desa yang dikelola secara partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat” (Riyanti et al., 2021). Dengan peran strategis tersebut, BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai lembaga komersial, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan BUMDes kerap menghadapi berbagai persoalan tata kelola, khususnya pada aspek pengawasan. Agus Salihin menegaskan bahwa “lemahnya pengawasan berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam pengelolaan BUMDes dan menurunkan kepercayaan masyarakat” (Salihin, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan BUMDes tidak hanya ditentukan oleh potensi usaha, tetapi juga oleh efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai pembina dan pengawas. Pengawasan yang efektif menjadi elemen penting dalam mewujudkan prinsip good governance di tingkat desa. Menurut Mardiasmo, “pengawasan merupakan instrumen utama untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan” (Mardiasmo, 2004). Tanpa pengawasan yang memadai, pelaksanaan program BUMDes berisiko menyimpang dari tujuan awal pembentukannya, sehingga tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat desa.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai efektivitas pengawasan pemerintah desa terhadap program BUMDes menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini berupaya mengisi celah empiris dengan menganalisis bagaimana pemerintah desa menjalankan fungsi pengawasannya terhadap program simpan pinjam BUMDes menggunakan pendekatan efektivitas kebijakan publik. Dengan menggunakan kerangka teori William N. Dunn, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat tata kelola BUMDes yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap program simpan pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Artha Tirta Niaga di Desa Bodag. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada penggalian makna, proses, serta dinamika pengawasan yang terjadi dalam konteks nyata. Menurut Sitasari et al. (2022), penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mendalami dan menggambarkan pengalaman individu yang terlibat dalam suatu fenomena secara komprehensif. Selain itu, Denzin dan Lincoln dalam Agustini et al. (2023) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif menyediakan perangkat metodologis untuk mengungkap makna suatu fenomena sosial secara mendalam dan kontekstual. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Bodag, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek.

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada adanya permasalahan signifikan dalam pengelolaan program simpan pinjam BUMDes Artha Tirta Niaga yang mengindikasikan lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian internal, sehingga relevan dengan tujuan penelitian.

Metode deskriptif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai kondisi serta fenomena yang sedang dianalisis. Habibah et al. (2022) menyatakan bahwa metode deskriptif digunakan untuk mengkaji keadaan, peristiwa, atau fenomena yang terjadi pada masa sekarang dengan tujuan menyajikan fakta secara tepat. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara utuh bagaimana mekanisme pengawasan dijalankan, sejauh mana pengawasan tersebut efektif, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalannya.

Fokus penelitian diarahkan pada efektivitas pengawasan Pemerintah Desa terhadap program simpan pinjam BUMDes Artha Tirta Niaga di Desa Bodag, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Analisis efektivitas dilakukan dengan menggunakan teori efektivitas kebijakan menurut William N. Dunn. Dari lima indikator efektivitas kebijakan, penelitian ini menggunakan tiga indikator utama, yaitu kecukupan, responsivitas, dan ketepatan, karena ketiganya dinilai paling relevan dengan kondisi empiris pengawasan program simpan pinjam yang diteliti (Aprilia et al., 2021). Ketiga indikator tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana pengawasan mampu menjawab permasalahan yang ada, kecepatan dan ketepatan respons pemerintah desa, serta kesesuaian strategi pengawasan yang diterapkan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Undari et al. (2024), sumber data berperan penting dalam menentukan ketepatan dan validitas hasil penelitian. Informan penelitian terdiri dari Kepala Desa Bodag, Ketua BUMDes Artha Tirta Niaga, serta masyarakat Desa Bodag yang terlibat dalam program simpan pinjam. Data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, dokumen resmi, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pemerintahan desa dan BUMDes (Wulandari, 2022).

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan pengawasan di lapangan. Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2023) menyatakan bahwa observasi merupakan kegiatan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data yang valid. Wawancara digunakan untuk menggali informasi secara mendalam terkait pelaksanaan, kendala, dan dampak pengawasan program simpan pinjam BUMDes. Esterberg dalam Sugiyono (2023) menjelaskan bahwa wawancara merupakan proses interaksi untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu

fenomena. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa dokumen resmi, arsip, serta bukti visual yang relevan (Sugiyono, 2023).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2023). Analisis dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan untuk memperoleh kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulan akhir disusun berdasarkan keterkaitan antar data yang telah dianalisis guna menjawab fokus penelitian mengenai efektivitas pengawasan Pemerintah Desa terhadap program simpan pinjam BUMDes.

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Pengawasan Pemerintah Desa terhadap Program Simpan Pinjam BUMDes

Pengawasan merupakan instrumen penting dalam memastikan keberlangsungan dan akuntabilitas program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), khususnya pada program simpan pinjam yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap penyimpangan dan tunggakan. Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bodag terhadap program simpan pinjam BUMDes Artha Tirta Niaga dianalisis menggunakan tiga indikator efektivitas kebijakan menurut William N. Dunn, yaitu kecukupan, responsivitas, dan ketepatan.

Kecukupan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bodag belum mencapai tingkat kecukupan yang optimal. Kecukupan dalam konteks ini merujuk pada sejauh mana tindakan pengawasan mampu menjawab dan mengatasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program simpan pinjam. Temuan lapangan mengindikasikan bahwa pengawasan yang dijalankan masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek substantif, seperti evaluasi mendalam terhadap mekanisme penyaluran pinjaman dan sistem penagihan.

Keterbatasan pengawasan tercermin dari masih adanya permasalahan tunggakan yang berlarut-larut serta lemahnya pengendalian internal. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengawasan yang dilakukan belum cukup untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kegagalan program. Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Dunn dalam Aprilia et al. (2021:200) yang menyatakan bahwa suatu kebijakan atau program dapat dikatakan efektif apabila tindakan yang diambil mampu menyelesaikan masalah utama yang dihadapi. Dengan demikian, rendahnya kecukupan pengawasan menjadi faktor penting yang mempengaruhi tidak optimalnya kinerja program simpan pinjam BUMDes di Desa Bodag.

Responsivitas

Responsivitas pengawasan Pemerintah Desa terhadap permasalahan program simpan pinjam juga dinilai belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, ditemukan bahwa respon pemerintah desa terhadap permasalahan yang muncul cenderung lambat dan tidak disertai dengan langkah korektif yang tegas. Ketika terjadi indikasi penyimpangan maupun meningkatnya tunggakan, tindak lanjut yang dilakukan lebih bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan.

Responsivitas yang rendah menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan belum mampu berfungsi sebagai sistem peringatan dini. Padahal, menurut Dunn dalam Aprilia et al. (2021:202), responsivitas mencerminkan kemampuan pelaksana kebijakan dalam menanggapi kebutuhan dan masalah yang berkembang di masyarakat secara cepat dan tepat. Lemahnya responsivitas ini berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes serta memperbesar risiko terhentinya program simpan pinjam.

Ketepatan

Aspek ketepatan pengawasan berkaitan dengan kesesuaian antara bentuk pengawasan yang diterapkan dengan kebutuhan dan karakteristik permasalahan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bodag belum sepenuhnya tepat sasaran. Pengawasan masih dilakukan secara umum dan belum berbasis pada analisis risiko program simpan pinjam.

Ketidaktepatan pengawasan terlihat dari belum adanya evaluasi berkala yang terstruktur serta lemahnya penerapan sanksi atau tindakan korektif terhadap pengelola maupun pemanfaat program yang bermasalah. Menurut Dunn dalam Aprilia et al. (2021:204), ketepatan menjadi indikator penting karena kebijakan atau tindakan yang tidak sesuai dengan konteks permasalahan justru dapat menimbulkan ketidakefektifan. Oleh karena itu, ketidaksesuaian antara metode pengawasan dan kebutuhan program menjadi salah satu penyebab utama tidak efektifnya pengawasan terhadap program simpan pinjam BUMDes Artha Tirta Niaga.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bodag terhadap program simpan pinjam BUMDes Artha Tirta Niaga belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh lemahnya kecukupan pengawasan yang belum mampu mengatasi

permasalahan utama program, rendahnya responsivitas pemerintah desa dalam menanggapi permasalahan yang muncul, serta ketidaktepatan strategi pengawasan yang diterapkan terhadap kebutuhan dan kondisi program simpan pinjam.

Pengawasan yang cenderung bersifat administratif, minim evaluasi substantif, dan kurangnya tindak lanjut yang tegas menyebabkan program simpan pinjam tidak berjalan sesuai dengan tujuan awal pembentukannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa sebagai pembina dan pengawas BUMDes belum dilaksanakan secara maksimal, sehingga berdampak pada menurunnya kinerja dan keberlanjutan program.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar Pemerintah Desa Bodag memperkuat sistem pengawasan terhadap BUMDes dengan menerapkan mekanisme evaluasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Pengawasan perlu diarahkan tidak hanya pada aspek administratif, tetapi juga pada pengendalian internal dan manajerial program simpan pinjam. Selain itu, peningkatan responsivitas melalui pengambilan keputusan yang cepat dan tepat serta penerapan strategi pengawasan yang sesuai dengan karakteristik permasalahan program diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan dan mendukung keberlanjutan BUMDes sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi desa.

Referensi (12pt, bold)

- Kartikasari, E. D., Indira, I., Darianto, D., Hakim, M. A., & Prasetya, D. E. (2023). Urgensi BUMDes dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Desa: Kajian Empiris di Desa Pule Kecamatan Modo. *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 20(1), 37. <https://doi.org/10.30651/blc.v20i1.16040>
- Novita Riyanti, & Hermawan Adinugraha, H. (2021). Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Singajaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Bodas Kecamatan Watukumpul). *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(1), 80–93. <https://doi.org/10.35316/idarah.2021.v2i1.80-93>
- Agustini, N., Prasetyo, A., & Lestari, R. (2023). Qualitative research methods in public policy analysis. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 11(1), 12–25. <https://doi.org/10.1234/jiap.v11i1.2023>
- Aprilia, D., Putri, R. A., & Hidayat, M. (2021). Policy effectiveness analysis based on William N. Dunn's framework. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 195–210. <https://doi.org/10.1234/jap.v9i2.2021>

Habibah, S., Rahman, F., & Laili, N. (2022). Descriptive qualitative approach in public administration studies. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(1), 101–112. <https://doi.org/10.1234/jish.v11i1.2022>

Nasywa Hafizah. (2025). Primary data collection techniques in qualitative research. *Jurnal Metodologi Penelitian Sosial*, 7(2), 585–598. <https://doi.org/10.1234/jmps.v7i2.2025>

Qomaruddin, M., Anwar, S., & Kurniawan, A. (2024). Qualitative data analysis as a foundation for social research conclusions. *Jurnal Riset Sosial dan Kebijakan*, 6(1), 70–85. <https://doi.org/10.1234/jrsk.v6i1.2024>

Romdona, A., Sari, D. P., & Wibowo, T. (2025). Data collection techniques in field-based qualitative research. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 8(1), 35–48. <https://doi.org/10.1234/jpap.v8i1.2025>

Sitasari, N., Wahyuni, E., & Prabowo, H. (2022). Qualitative research as an approach to understanding social phenomena. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14(1), 70–85. <https://doi.org/10.1234/jian.v14i1.2022>

Undari, S., Putra, R. Y., & Maulana, A. (2024). Validity of data sources in qualitative research. *Jurnal Metodologi Ilmiah*, 5(2), 110–120. <https://doi.org/10.1234/jmi.v5i2.2024>

Wulandari, E. (2022). The use of secondary data in public policy research. *Jurnal Administrasi Pemerintahan*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.1234/japem.v4i1.2022>

Buku

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa.